

RENCANA AKSI

Nama Peserta Pelatihan : Andy Kusuma, ST
Unit Kerja : Bapenda Prov. PB
NIP
Nama Atasan Peserta : Charles H.P. Hutauruk, SE, MM
(idem)

Apakah anda mengimplementasikan Rencana Aksi ini sendiri atau berkelompok?
 sendiri

berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang lain dalam tabel di bawa.

No.	Nama anggota kelompok lainnya
1	Sekretaris
2	Kabid Pajak
3	Ka. UPT/Samsat

Nama Mentor : Dian Aditya
Program : Internship Kementerian Keuangan
Lokasi Pelatihan : Jakarta
Tanggal mulai Pelatihan : 11 s.d. 20 September 2017

1 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam institusi/organisasi/ lingkungan anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan mengimplementasikan sebuah Rencana Aksi.

-
- Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Papua Barat dirasa belum signifikan dan perlu ada pembenahan.
 - Keefektifan dan efisiensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Papua Barat belum maksimal dengan Penerapan Peraturan yang seharusnya.
 - Masih kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Papua Barat.
-
-

2 Apakah judul Rencana Aksi anda?

**OPTIMALISASI
PENINGKATAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**

3 Apakah manfaat/hasil dari Rencana Aksi anda tersebut?

- Dapat Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah khususnya PKB.
- Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar PKB tepat waktu.

4 Uraikan bagaimana Rencana Aksi anda memenuhi kriteria SMART

Specific Spesifik	<i>Aktifitas spesifik apa yang akan anda lakukan dalam melaksanakan Rencana Aksi anda?</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Dilakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak, berupa Sosialisasi pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
	<ul style="list-style-type: none">• Bekerjasama dengan Kepolisian untuk melakukan Razia Kendaraan Bermotor yang belum melunasi PKB.
	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dan penyempurnaan regulasi khususnya dibidang penerapan sanksi atas pelanggaran Pajak Daerah
	<ul style="list-style-type: none">• Bekerjasama dengan Kepolisian dan kejaksaan agar proses penyitaan terkait pelanggaran perda PKB tidak bermasalah secara hukum (Legalitas Proses Penegakan Hukum).
Measurable Dapat diukur	<i>Mengukur keberhasilan rencana aksi, dengan cara menghitung perubahan jumlah piutang PKB dan teridentifikasinya produk hukum yang dibutuhkan terkait penegakan hukum atas pelanggaran Perda Pajak Daerah.</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Jangka pendek prediksi 2 bulan. (Jumlah piutang PKB yang sudah dibayar diharapkan turun sekitar 10% - 30% dan kebutuhan produk hukum sudah dapat teridentifikasi)
	<ul style="list-style-type: none">• Jangka Panjang Prediksi 1 Tahun Kedepan. Jumlah piutang PKB yang sudah dibayar diharapkan turun sekitar 30% - 80% dan Peraturan terkait yang dibutuhkan sudah ditetapkan)
Achievable Dapat dicapai	<i>Apa alasan anda, mengapa anda sangat yakin bahwa Rencana Aksi anda tersebut dapat dilaksanakan?</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Sudah tersedianya SDM yang profesional dan berkompeten• Sudah tersedianya pengaturan awal terkait mekanisme penyelesaian piutang PKB.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Anggaran untuk melaksanakan Razia Kendaraan Bermotor yg masih menunggak pembayaran PKB. • Tersedianya anggaran untuk mengadakan rapat/diskusi terkait identifikasi awal kebutuhan/penyempurnaan produk hukum.
R elevant R elevant	<p><i>Bagaimana relevansi Rencana Aksi anda terhadap: (a) institusi/organisasi anda dan (b) tugas anda ?</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat/Diskusi sangat dibutuhkan terkait koordinasi lintas unit, guna mengoptimalkan realisasi PAD dan memperkecil jumlah piutang PKB, dan memastikan adanya payung hukum atas semua kegiatan penindakan yang diperlukan
	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan semakin menurunnya jumlah piutang PKB tentunya dapat menambah penghasilan PAD di tahun berjalan sehingga dapat mempengaruhi kenaikan insentif pemungutan yang diterima
	<ul style="list-style-type: none"> • Selain itu setiap langkah yang dilakukan kedepannya akan lebih mudah dikarenakan sudah memiliki aturan dan prosedur yang baku
T imely R entang/ketepatan waktu	<p><i>Mengapa waktu yang anda tetapkan tersebut adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan Rencana Aksi anda?</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Identifikasi kebutuhan/penyempurnaan Produk Hukum dilakukan pada triwulan IV tahun 2017.
	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan ^{Produk} Hukum yang dibutuhkan akan dilakukan mulai Januari 2018 s.d. September 2018
	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kepada stakeholders terkait dilakukan pada triwulan IV tahun 2017 dan triwulan IV tahun 2018.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan identifikasi dilakukan selama 3 hari dimana hari pertama yaitu : berupa diskusi guna mengidentifikasi Peraturan-peraturan tentang Pemungutan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor apa saja yang belum tersedia khususnya terkait dengan Penyelesaian Piutang PKB dan Penegakan Hukum atas Pelanggaran Perda Pajak Daerah. Kemudian di hari berikutnya dilakukan identifikasi kemungkinan reaksi masyarakat terhadap munculnya kebijakan tersebut
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sosialisasi dilakukan selama 3 hari dengan melibatkan para WP PKB. 	

5

Gunakan format berikut ini untuk menunjukkan:

- Kegiatan-kegiatan yang akan anda laksanakan
 - Kapan anda memulai dan mengakhiri kegiatan-kegiatan tersebut
- Jika Rencana Aksi berkelompok tuliskan kependekan nama anggota yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan*

NAMA KEGIATAN	Minggu ke-1	Minggu ke-2	Minggu ke-3	Minggu ke-4	Minggu ke-5
1. Draft Rencana Aksi					
1.1. Membuat TOR kegiatan	■				
1.2. Mendiskusikan dengan Kabid & Staf	■				
2. Persetujuan Atasan					
2.1. Mengajukan TOR untuk pada atasan	■				
2.2. Mengajukan anggaran		■			
3. Persiapan					
3.1. Menyiapkan Bahan Perumusa Kebijakan serta Menghubungi narasumber dan unit kerja terkait		■			
3.2. Membuat undangan dan menyebarkan		■			
4. Implementasi					
4.1. Diskusi terkait perumusan kebijakan			■		
4.2. Sosialisasi pada wajib pajak.				■	
5. Selesai dan melaksanakan rencana aksi yang lain					
5.1. Pembuatan laporan		■	■	■	■
5.2. Pertanggungjawaban keuangan					■
5.3. Monitoring & Evaluasi		■	■	■	■

6 Sumberdaya apa yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi anda, dan bagaimana anda mendapatkan sumberdaya tersebut?

- Tersedianya Anggaran dalam DPA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017.
- Peserta Diskusi berasal dari Bapenda Prov. PB, Biro Hukum Setda Prov.PB, Kepolisian, Kejaksaan dan Para Kepala UPT/Samsat se Papua Barat.
- Ruang Pertemuan di Ruang Rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah Prov. PB

7 Identifikasi kemungkinan hambatan dalam mengimplementasikan Rencana Aksi anda? Bagaimana cara anda menanggulangnya?

- Adanya penghematan/pemotongan APBD TA 2017, sehingga diperlukan penyesuaian output dan komponen kegiatan atau dialihkan ke Tahun Anggaran berikutnya
- Adanya Mutasi kepegawaian, melakukan monitoring dalam rangka pendampingan di masa transisi.

8 Bagaimana Rencana Aksi anda dapat meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance), kesadaran gender (gender awareness) dan manajemen perubahan (change management)?

Pemerintahan yang baik (*good governance*)

- Perencanaan yang baik akan menghasilkan rencana yang baik. Dengan demikian implementasi kegiatan tersebut juga dapat sesuai dengan rencana.
- Diharapkan setelah mengikuti Diskusi ini setiap UPT/Samsat Se-PB dapat Meningkatkan PAD Khusus Sektor PKB dan Mengurangi Jumlah Piutang PKB sesuai dengan aturan yang ada.

Kesadaran Gender (*gender awareness*)

- Para peserta tidak dibedakan atas jenis kelamin baik pria maupun wanita.
- Semua Kepala Bidang, Para Kepala Seksi, Kasubbag dan Kepala UPT/Samsat lingkup Badan Pendapatan Daerah Prov. PB berhak mengikuti kegiatan tersebut.
- Bagi kepala seksi yang berhalangan ikut akan digantikan oleh salah seorang staf pada seksi tersebut

**Managemen
Perubahan (*change
management*)**

- Setelah dilakukan identifikasi kebutuhan peraturan terkait penyelesaian piutang PKB dan penegakan hukum atas pelanggaran Perda Pajak Daerah, diharapkan Para UPT/Samsat Se-PB. bisa menyelesaikan masalah piutang PKB yang ada di wilayah Prov. Papua Barat sesuai dengan koridor hukum yang ada (setiap tindakan dilakukan sesuai dengan Hukum dan Prosedur)
-
-